



WASPOLA Facility
Indonesia Water Supply and Sanitation Policy
and Action Planning Activity

Provinsi Sumatera Barat Penghargaan untuk Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Layanan Air Minum & Penyehatan Lingkungan

1. Latar Belakang



Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen cukup tinggi terhadap sektor air minum dan sanitasi. Ini tidak lepas dari keberadaan Pokja AMPL provinsi. Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk di tahun 2004 inilah yang mengelola kegiatan-kegiatan dan program pengembangan air minum melalui kegiatan Air Minum Berbasis Masyarakat, sanitasi seperti Pamsimas, Sanimas, P2KP, WSLIC 2, STBM dan PPSP.

Pokja AMPL berupaya memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan dengan tujuan pencapaian cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Tak mengherankan bila fasilitasi yang dilakukan Pokja AMPL provinsi menghasilkan peningkatan daerah replikasi kebijakan AMPL dari 6 Kabupaten/Kota tahun 2007 menjadi 15 Kabupaten/Kota pada tahun 2008. Dan sampai saat ini perluasan cakupan adalah 19 Kabupaten/Kota mengikuti program PPSP dan 14 Kabupaten/Kota mengikuti Program PAMSIMAS II.

2. Deskripsi

Dua hal penting yang konsisten dilakukan Pokja AMPL Sumatera Barat antara lain Penguatan Kelembagaan secara kontinyu serta (2) Penguatan proses perencanaan yang ditandai dengan penyusunan dokumen Pembangunan AMPL di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota. Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat telah mampu melakukan replikasi oleh Kabupaten/Kota seperti pembentukan Pokja AMPL, Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan AMPL.

Fasilitasi yang dilakukan oleh provinsi dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan AMPL dari agenda 2013:

- a. Dokumen di tingkat provinsi
Dukungan Provinsi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan AMPL di tingkat Provinsi antara lain yakni:
 - Penyediaan anggaran penyusunan dokumen perencanaan (Renstra AMPL Provinsi)
 - Pelaksanaan konsinyir dan supervisi dari Pokja AMPL Nasional dan Waspola terhadap dokumen Renstra AMPL Provinsi Sumatera Barat
 - Fasilitasi penilaian Service Delivery Assesment (SDA) Tools pada Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota dengan Waspola/Bank Dunia
- b. Dokumen di tingkat kabupaten/kota Dukungan Provinsi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan AMPL di Kabupaten/Kota antara lain:
 - Melakukan penjaminan mutu dokumen PPSP secara reguler
 - Melakukan penjaminan mutu dokumen Renstra AMPL Kabupaten/Kota
 - Melakukan penjaminan mutu dokumen RAD AMPL Kabupaten/Kota
 - Menyediakan tenaga narasumber/supervisi terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan AMPL Kabupaten/Kota



Sedangkan dalam pelaksanaannya inventarisasi dan sinergi proyek AMPL yang dilakukan adalah:

Inventarisasi proyek AMPL	PAMSIMAS, PPSP, PNPMP Perdesaan dan PNPMP Perkotaan dan Pembangunan AMPL bersumber dari APBD Provinsi
Inventarisasi proyek / program mana yang akan disinergikan	Program PAMSIMAS, PNPMP Perdesaan dan PNPMP Perkotaan, PPSP
Langkah yang sudah dilakukan	Koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan AMPL baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Regulasi yang telah dihasilkan terkait AMPL di Provinsi Sumatera Barat

1. Perda Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang RAD MDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 nomor 48/ tahun 2011
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Renstra AMPL Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 no

3. Pembelajaran

Pokja AMPL Sumatera Barat belajar dari tahun ke tahun bahwa pendekatan kelembagaan dan sosialisasi terhadap stakeholder adalah hal penting. Dalam berbagai kesempatan seperti lokakarya serta rapat koordinasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan AMPL bagi daerah dan masyarakat, sekaligus pencapaian indeks pembangunan manusia. Dan ini bisa dicapai melalui konsistensi Pokja AMPL itu dalam menuju pencapaian target AMPL.



Dukungan masyarakatnya pun cukup besar. Ini antara lain terbukti dengan adanya Badan Pengelola yang dibentuk oleh masyarakat pengguna untuk persampahan dengan skala kecil dan pelayanan dari Rumah Tangga sampai TPS; perubahan perilaku melalui pembuatan jamban disetiap rumah; pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; penggunaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi lebih mudah, sehingga keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana lebih efektif.

4. Tantangan

Saat ini seperti yang dialami hampir semua Pokja AMPL adalah Mutasi dan rotasi pejabat anggota Pokja AMPL

5. Contact Person

Drs. H. Youlius Honesti, M.Si
 Kabid KPKP Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 Sekretaris Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat
 Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat d/a. Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
 Hp. 08126618418 Email: y_honesti@yahoo.com

Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Pokja AMPL
 Jl.RP Suroso no .50 Jakarta Indonesia .Tekp/fax: (62-31) 31904113, 319-2909.
 Email: pokja@ampl.or.id

